

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Teori

2.1.1. Variabel Penelitian Penyerapan Anggaran (Y)

Menurut Indra Bastian (2015: 8) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Saat ini, otonomi dalam pembangunan nasional Indonesia telah berjalan dengan cukup baik. Walaupun demikian, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, masih banyak mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga penerapan konsep otonomi ini menimbulkan kesenjangan antar daerah yang relatif tinggi.

Menurut Abdul Halim (2014: 91) Penyerapan anggaran adalah realisasi dari anggaran. Secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama, diistilahkan menurut Bank Indonesia, yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (*slow and back-loaded expenditure*). Penyerapan yang menumpuk diakhir tahun biasanya belanja yang non-recurrent, seperti belanja modal dan belanja bantuan sosial. Masalah lain juga terkait realisasi anggaran yang lebih rendah dari anggaran yang telah direncanakan. Menurut Abdul Halim (2014: 98) Faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya Perencanaan Anggaran

Perencanaan yang dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

2. Lamanya proses pembahasan anggaran

Rendahnya penyerapan juga disebabkan karena proses pembahasan anggaran yang lama yang dilakukan oleh DPRD sehingga program-program tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana.

3. Lambannya proses tender

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa belum disosialisasikan secara merata sehingga masih adanya beberapa pejabat yang belum memahami ketentuan peraturan dari pelaksanaan anggaran.

4. Ketakutan menggunakan anggaran

Ketakutan yang berlebih yang dirasakan oleh aparat negara menyebabkan pengalokasian anggaran yang dipergunakan menjadi stagnan. Inilah yang membuat rendahnya penyerapan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan informasi yang diakses pada Mdnnews.id, Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan, sejumlah faktor ditengarai menjadi pemicu rendahnya realisasi belanja APBD TA 2021. Hal itu seperti kondisi *pandemic covid 19* dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan kurangnya realisasi anggaran belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktor lainnya disebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan kontraktual, lantaran kegiatan fisik yang dianggarkan OPD masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau *Detail Engineering Design (DED)*. Ia menambahkan penyebab lainnya yakni belum adanya tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga, sehingga pemerintah daerah juga belum dapat membayarkan tagihan dan cenderung menempatkan uangnya di Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Berdasarkan definisi penyerapan anggaran di atas maka menghasilkan sintesanya, penyerapan anggaran adalah sebuah pencapaian dalam merealisasikan anggaran. Dimensi dan indikatornya adalah yang pertama realisasi anggaran. Indikator dari realisasi anggaran yaitu target realisasi anggaran di OPD dan persentase realisasi anggaran. Dimensi dan indikator yang kedua adalah kondisi program kegiatan di OPD. Indikator dari dimensi tersebut ialah revisi program kegiatan dan faktor penyerapan anggaran.

2.1.2. Variabel Penelitian Perencanaan Anggaran (X1)

Menurut Zarinah, dkk (2016: 91) perencanaan anggaran merupakan faktor terpenting dalam peningkatan penyerapan anggaran, semakin buruk suatu perencanaan maka akan semakin banyak hambatan dan kesulitan yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah d secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
5. Penyiapan Raperda APBD.
6. Penetapan APBD.

Menurut Abdul Halim (2014: 94) sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik hal yang dilakukan adalah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. PBK menggunakan instrumen:

- a. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja program/kegiatan.
- b. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa standar untuk mengukur efisiensi masukan maupun keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.
- c. Evaluasi kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian sasaran, kualitas kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan pengertian di atas maka di tarik sintesanya perencanaan anggaran adalah sebuah dokumen yang berisi rencana anggaran yang dijadikan acuan sebagai dasar dalam proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu dan perencanaan ini perlu adanya persetujuan dari DPRD. Dimensi untuk perencanaan anggaran yang pertama yaitu proses penyusunan dokumen yang menghasilkan indikator yaitu penyusunan pagu anggaran, kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan organisasi. Dimensi selanjutnya pembahasan dokumen menghasilkan indikator yaitu perhitungan layakan komposisi belanja dan program persetujuan DPRD.

2.1.3. Variabel Penelitian Pelaksanaan Anggaran (X2)

Menurut BPKP (2011) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Menurut jurnal Ferdinan, dkk (2020: 121) berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya reward dan punishment, dan kebiasaan menunda pekerjaan di penjelasan ini berada dalam penelitian.

Menurut Suryopratomo (2010) dalam penelitian Wieske, dkk (2019: 80) kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan. Berdasarkan konsep dan teori di atas maka dapat kami tarik sintesanya definisi, dimensi, dan indikator pelaksanaan anggaran adalah kegiatan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan meliputi internal OPD dan mekanisme pembayaran. Definisi ini menghasilkan dimensi dan indikator yaitu dimensi internal OPD yang menghasilkan indikator kelengkapan dokumen, keterlambatan penagihan dan pembayaran pelaksanaan kegiatan, SK Pejabat Perbendaharaan. Lalu dimensi mekanisme pembayaran menghasilkan indikator menentukan HPS dan proses verifikasi dan pembuatan SPM.

2.1.4. Variabel Penelitian Pengadaan Barang dan Jasa (X3)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang danJasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 8, pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- 1) Kuasa pengguna anggaran,
- 2) Pejabat pembuat komitmen,
- 3) Panitia/pejabat pengadaan/unit layanan,
- 4) Tim swakelola dan
- 5) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Mayoritas lambatnya serapan anggaran terus terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan dan harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan Undang-Undang. Menurut I Putu Jati Arsana (2016: 36) Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa:

1. Persiapan pengadaan barang/jasa. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Perencanaan umum pengadaan barang dan jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penganggaran, pemaketan pekerjaan, penyusunan organisasi pengadaan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
 - c. Perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa meliputi pengkajian ulang rencana umum pengadaan, pemilihan sistem penyedia barang dan jasa, pemilihan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang dan jasa dan penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa.
2. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah:
 - a. Pengumuman pengadaan barang/jasa.
 - b. Penjelasan pekerjaan.
 - c. Pemasukan dokumen penawaran.
 - d. Evaluasi dokumen penawaran.
 - e. Pembuktian kualifikasi.
 - f. Penetapan pemenang.
 - g. Pengumuman pemenang.
 - h. Sanggahan

3. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Adapun jenis kegiatannya meliputi:
 - a. Penunjukan penyedia barang/jasa.
 - b. Penandatanganan kontrak.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Abdul Halim (2014: 100) beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran sering kali berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- a. Kegiatan dilaksanakan pada tahap akhir tahun anggaran sehingga realisasi keuangan masih berupa uang muka ;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada panitia lelang menyebabkan proses pelelangan harus mengikuti ketersediaan waktu tim/panitia lelang. Hal ini menyebabkan keterlambatan penetapan pemenang yang mempengaruhi penyerapan anggaran
- c. Adanya perubahan jenis barang yang akan diadakan, sementara dokumen perubahannya juga terlambat; dan
- d. Adanya keterlambatan penetapan panitia lelang karena terbatasnya SDM yang telah bersertifikat dan adanya keengganan untuk mau terlibat menjadi anggota panitia.

Berdasarkan konsep dan teori di atas maka dapat kami tarik sintesanya definisi, dimensi dan indikator pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang diatur dengan undang-undang yang berlaku dan bertujuan untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Definisi di atas menghasilkan dimensi dan indikator berupa pemahaman peraturan yang menghasilkan indikator yaitu target pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemahaman panitia/ pejabat. Lalu dimensi pembentukan struktur organisasi menghasilkan indikator berupa SDM yang bersertifikat dan hambatan dalam struktur organisasi. Dimensi penentuan HPS menghasilkan indikator penyusunan HPS dan penentuan harga.

2.2. Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pemikiran ataupun arah dari penelitian ini.

Berikut penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi - Muhamad Syahwilda , Irma Damayanti (2022)	Variabel Independen: 1) Perencanaan anggaran (X1) 2) Pelaksanaa anggaran (X2) 3) Pencatatan administrasi (X3) 4) Kompetensi sumber daya manusia (X4) Variabel Dependen: 1) Tingkat Penyerapan anggaran (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 85,7% sedangkan sisanya 14,3% dipengaruhi oleh variabel lain.
Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi - Titin Delia, Syahril Djaddang, Suratno, JMV. Mulyadi (2021)	Variabel Independen: 1) Kompetensi SDM 2) Pengadaan barang dan jasa 3) Komitmen organisasi 4) Perencanaan anggaran Variabel Dependen: 1) Penyerapan anggaran	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumberdaya manusia, proses pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Jambi	Variabel Independen: 1) Perencanaan anggaran (X1) 2) Pelaksanaa anggaran (X2) 3) Administrasi (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Tahun Anggaran 2020

Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Tahun Anggaran 2020 - Dhea Nanda Arlena (2021)	4) Pengadaan barang dan jasa (X4) 5) Sumber daya manusia (X5) Variabel Dependen : 1) Penyerapan anggaran (Y)	Tahun adalah faktor perencanaan anggaran yang tidak tepat dan faktor pelaksanaan anggaran yang terhambat karena refocusing anggaran dan realokasi kegiatan yang mendadak, maka Faktor force majeure yang menyebabkan sistem kerja SDM di BPOM Jambi adalah selalu berubah selama pandemi covid 19.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi - Viki Ulandari , Akram , Budi Santoso (2021)	Variabel Independen: 1) Perencanaan (X1) 2) Sumber daya manusia (X2) 3) Pengadaan barang dan jasa (X3) 4) Administrasi (X4) Variabel Dependen : 1) Penyerapan Anggaran (Y)	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan administrasi berpengaruh negatif terhadap hubungan perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa dengan penyerapan anggaran.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Unit Kerja Mahkamah Agung Di Wilayah Riau Dan Kepri Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Faktor Moderasi -M. Irwan Tofani, Amir Hasan, Nasrizal Nasrizal. (2020)	Variabel Independen: 1) Beban kerja (X1) 2) Pemanfaatan (X2) 3) Teknologi informasi (X3) 4) Perencanaan (X4) 5) Administrasi (X5) 6) Sumber daya manusia (X6) 7) Pengadaan barang dan Jasa (X7) Variabel Dependen : 1) Penyerapan anggaran (Y)	Memperoleh hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan Beban Kerja tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Komitmen Organisasi juga pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, Komitmen Organisasi mampu mempengaruhi hubungan sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, namun tidak bisa memperkuat hubungan antara perencanaan terhadap penyerapan anggaran.

Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah – Dheya Rahmani Wiansyah Sri Mulyani (2021)	Variabel Independen: 1) Kompetensi sumber daya perencana dan pelaksana anggaran (X1) 2) Implementasi pengadaan barang dan jasa (X2) 3) Sistem pengendalian intern pemerintah (X3) Variabel Dependen : 1) Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan implementasi pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Bogor. Untuk sistem pengendalian pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Bogor.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan (Kantor Walikota Medan) – Fera Afifah (2021)	Variabel Independen: 1) Perencanaan 2) Administrasi 3) Kompetensi sumber daya manusia 4) Dokumen pengadaan 5) Ganti uang persediaan Variabel Dependen: 1) Penyerapan anggaran	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan pengajuan ganti uang persediaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Secara parsial variabel perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan, sedangkan administrasi dan dokumen pengadaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.
Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan	Variabel Independen: 1) Perencanaan anggaran (X1) 2) Pelaksanaan anggaran (X2)	Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu,

Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
<p>Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai) - Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, Nurazlina (2020)</p>	<p>3) Kompetensi sumber daya manusia (X3) Variabel Dependen: 1) Tingkat penyerapan Anggaran (Y)</p>	<p> pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain.</p>
<p>Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis - Kennedy, Nur Azlina , Julita, dan Suci Nurulita (2020)</p>	<p>Variabel Independen: 1) Perencanaan anggaran (X1) 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) 3) Komitmen Organisasi (X3) 4) Pencatatan Administrasi (X4) 5) Sistem Pengendalian Internal (X5) Variabel Dependen : 1) Tingkat Penyerapan Anggaran (Y)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.</p>
<p>Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia - Ferdinan, Isnurhadi, Marlina Widiyanti, Mohamad Adam (2020)</p>	<p>Variabel Independen: 1) Perencanaan Anggaran (X1) 2) Pelaksanaan Anggaran (X2) 3) Komitmen Organisasi (X3) Variabel Dependen : 1) Penyerapan Anggaran (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak memperkuat atau memperlemah hubungan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</p>

Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi - Rika Septi Rahmawati , Jouzar Farouq Ishak (2020)	Variabel Independen: 1) Perencanaan anggaran (X1) 2) Pelaksanaan anggaran (X2) 3) Regulasi (X3) 4) Sumber daya manusia (X4) 5) Pengadaan barang dan jasa (X5) Variabel Dependen : 1) Penyerapan Anggaran (Y)	Hasil sebagian penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia sumber daya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kota Cimahi. Sementara secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia sumber daya, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kota Cimahi
Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi - Wieske Anneleen Ratag , Anderson G. Kumenaung, Daisy S.M. Engka (2019)	Variabel Independen: 1) Anggaran Belanja Pegawai (X1) 2) Belanja Barang (X1) 3) Belanja Modal (X2) Variabel Dependen: 1) Penyerapan Anggaran DIPA (Y)	Hasil penelitan menunjukan bahwa anggaran belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penyerapan anggaran DIPA. Begitu juga dengan belanja barang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DIPA

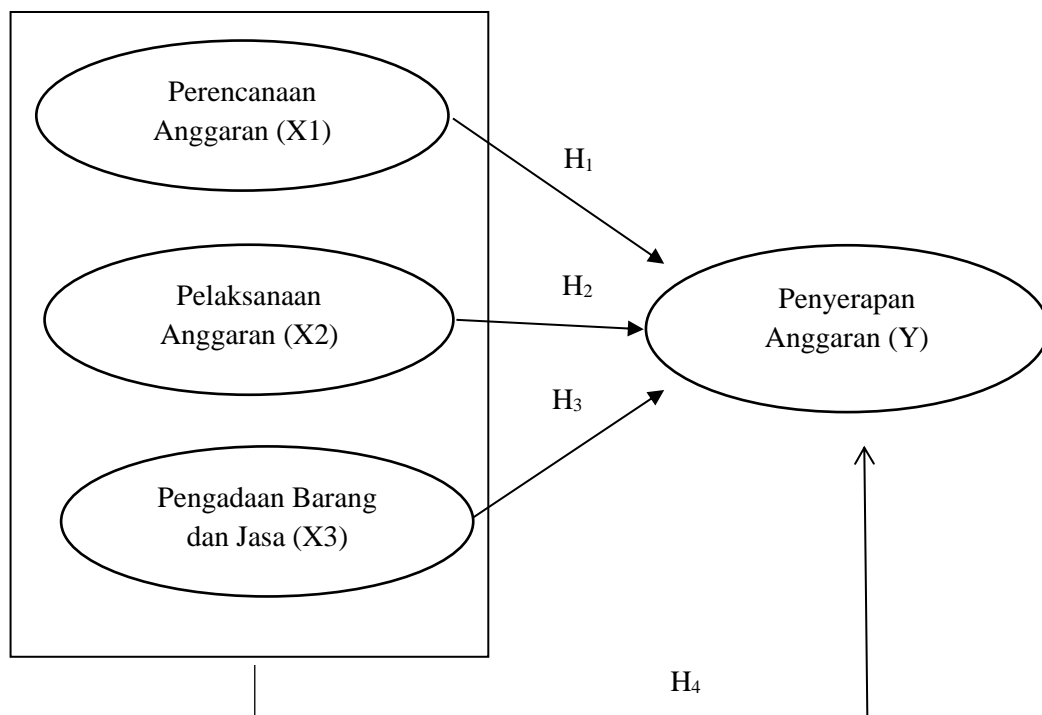
Sumber: Data yang diolah, 2022

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis menguraikan dalam bentuk kerangka pikir untuk variabel bebas yaitu perencanaan anggaran sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi (prioritas), evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kesesuaian aturan, ketepatan waktu (disiplin), partisipatif serta revisi (kesalahan administrasi). Perencanaan anggaran itu membutuhkan proses persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan.

Pelaksanaan Anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Menurut Herriyanto (2012) berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya reward dan punishment, dan kebiasaan menunda pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dibiayai APBD/APBD dan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini harganya dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Permasalahan yang timbul disaat kegiatan pengadaan barang dan jasa seperti kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dirasakan masih kurang, karena masih sedikitnya jumlah pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Menurut Yanuriza et al., (2019) besarnya tanggung jawab dan resiko yang ditanggung oleh panitia pengadaan barang dan jasa karena tidak seimbangnyaa resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima juga memperlambat penyerapan anggaran.



Sumber : Data yang diolah, 2022

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan anggaran

Penelitian yang dilakukan Sasmita, dkk (2020) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai) menghasilkan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Viki, dkk (2021) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah dengan administrasi sebagai pemoderasi menyatakan perencanaan anggaran berpengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fedinan, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada badan penelitian dan pengembangan kesehatan Republik Indonesia menghasilkan perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Menurut penelitian Ferdinan, dkk (2020) Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menjabarkan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan/sasaran. Penetapan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut penelitian Kenendy, dkk (2020) Menurut DJPK perencanaan sebagai pedoman bagi penganggaran yang pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Glennard mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia disebabkan oleh terpecahnya proses perencanaan dan alokasi keuangan karena lemahnya kapasitas perencanaan disemua tingkatan dalam sistem. Pendekatan *top-down* yang diterapkan di tingkat pusat tanpa kejelasan peran dan tanggung jawab serta arahan yang tidak tepat dalam perencanaan bagi OPD terkait. Berdasarkan penjelasan diatas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Perencanaan Anggaran secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.2. Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan anggaran

Penelitian yang dilakukan Sasmita, dkk (2020) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai) menghasilkan bahwa faktor pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan Fedinan, dkk (2020) mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada badan penelitian dan pengembangan kesehatan Republik Indonesia menyatakan secara parsial pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan Wieske, dkk (2019) mengenai pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan universitas sam ratulangi menghasilkan pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tahun anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah adalah tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jika pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka penyerapan anggarannya juga semakin baik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga Pelaksanaan Anggaran secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.3. Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan anggaran

Penelitian yang dilakukan Syahwildan, dkk (2022) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di pemerintah daerah kabupaten bekasi menyatakan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan Rika, dkk (2020) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada pemerintah kota cimahi menyatakan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada pengadaan barang dan jasa

berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.4. Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut Sugiyono (2018: 63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Penelitian ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran. Berdasarkan penjelasan diatas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.